

## Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis *Website* Menuju Desa Digital untuk Perangkat Desa Baros, Serang, Banten

Aniqotul Ummah\*, Siti Maryam, Jati Satrio, Chairun Nisa Zempi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran ” Jakarta

\*Penulis korespondensi: aniqotulummah@upnvj.ac.id

**Abstrak:** *Kemajuan teknologi dan pengetahuan pada era digital, telah mengubah corak dunia dari yang sebelumnya konvensional menuju pengembangan teknologi berbasis internet. Hal ini berdampak pada perubahan arah kehidupan sosial, politik, ekonomi. Tak terkecuali dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dari yang konvensional menjadi berbasis website, dengan tujuan agar lebih efisien, selain itu pelayanan publik berbasis website dapat memudahkan interaksi dengan masyarakat serta mendorong akuntabilitas dan transparansi desa dengan lebih efektif. Dalam rangka penerapan e-government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan mempercepat proses good governance, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) UPN “Veteran” Jakarta yang terdiri dari 7 anggota dosen, memberikan pelatihan pelayanan berbasis website kepada para perangkat Desa Baros, Kabupaten Serang Banten, untuk menuju desa digital. Dalam pelatihan ini, perangkat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengoperasikan website desa dengan maksimal yang sebelumnya tidak aktif. Setelah pelatihan website, para peserta memahami dan aktif mengisi konten berita dan informasi lainnya ke website desa dengan arahan dan bimbingan langsung dari tim abdimas. Hasil kegiatan menunjukkan peserta yang merupakan perangkat desa dapat mengunggah konten ke dalam website secara mandiri.*

**Kata kunci:** *pelatihan, pelayanan publik, pengabdian masyarakat, website desa.*

**Abstract:** *Advances in technology and knowledge in the digital era have changed the pattern of the world from what was previously conventional to the development of internet-based technology. This has an impact on changes in the direction of social, political, economic life. This is no exception in providing public services to the community, from conventional to website-based, with the aim of making it more efficient, besides that website-based public services can facilitate interaction with the community and promote village accountability and transparency more effectively. For this reason, in the context of implementing e-government as in accordance with Presidential Instructions No. 6 of 2021 concerning Telecommunications, Media, and Informatics which states that government officials must use information technology to support and accelerate the process of good governance, the UPN "Veteran" Jakarta Community Service team consisting of of 7 lecturer members, providing website-based service training to Desa Baros's officials, Serang Banten, to go digital village. In this training, it is hoped that village officials will have the knowledge and skills so that they can operationalize the village website to the maximum that was previously inactive. After the website training, the*

*participants understood and actively filled out news content and other information on the village website with direct direction and guidance from the community service team. The results of the activity show that participants who are village officials can upload content to the website independently.*

**Keywords:** *training, public services, village websites, community training.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia telah memasuki usia 77 tahun, akan tetapi kesiapan Indonesia dalam menghadapi gegap-gempita teknologi selalu menjadi persoalan. “Don’t be afraid of new arenas” petuah itulah yang seharusnya dipegang teguh sebagai fundamental untuk menghadapi era baru dalam siklus kehidupan yang mendunia ini. Kemajuan teknologi dan pengetahuan di era sekarang ini telah mengubah corak dunia hari ini dari zaman konvensional menuju pengembangan teknologi berbasis internet. Hal ini tentunya berdampak pada perubahan arah kehidupan sosial, politik maupun ekonomi yang dituntut untuk bertransformasi dan menyesuaikan perubahan tersebut. Pandemi COVID-19 juga tidak lekas memaksa pemerintah melakukan perubahan khususnya pada pelayanan publik, dari konvensional menjadi pelayanan publik dengan memaksimalkan internet untuk segera dilakukan. Birokrasi pemerintah harus dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas, serta transparansi pelayanan publik yang efektif lagi efisien (Septiani, 2020; Sukarno & Saleh, 2021).

Penerapan *e-government* kemudian menjadi solusi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk tetap memberi dan mendapatkan pelayanan seperti sebelumnya, hanya saja dengan cara yang lebih modern. Di Indonesia, penerapan *e-government* dapat dilacak pertama kali sejak turunnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan mempercepat proses *good governance* (Irawan, 2018). Hingga akhirnya, pada tahun 2006, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dibentuk demi mengupayakan percepatan implementasi *e-government*.

Penerapan *e-government* mempunyai peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik (Selwyn, 2004). Disamping itu juga memiliki dampak yang begitu besar terhadap kinerja lembaga pemerintahan, salah satunya pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam, tidak terikat

waktu dan jarak, serta berbagai kelebihan lain. Birokrasi pemerintahan yang berada di lingkungan daerah harusnya menjadikan perkembangan teknologi informasi berbasis internet ini sebagai media pendukung dalam upaya mengefektifkan kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat desa (Mardjiono, 2009). Meskipun pada hasil survei penelitian *e-government Development Index (EGDI)* dari PBB Tahun 2020 menempatkan Indonesia di urutan 88 dengan value 0,6612, tetap saja masih tertinggal jauh dengan negara tetangga Singapura dengan value 0,915. Penerapan *e-government* di Indonesia khususnya pemerintah daerah, dirasa belum siap dengan pelayanan birokrasi berbasis elektronik. Hal ini karena ada kesenjangan digital (*digital divide*) antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan akses internet. Menurut survei yang diterbitkan APJII Tahun 2017, mayoritas pengguna layanan Internet di Indonesia tinggal di perkotaan dan pedesaan berbanding jauh, dengan persentase pengguna perkotaan 72,41 persen, sedangkan masyarakat pedesaan hanya 48,25 persen dari jumlah total pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa (Oktavianoor, 2020). Menurut Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB tahun 2016, terbatasnya regulasi serta payung hukum dan SDM (sumberdaya manusia) yang kompeten di bidang teknologi menjadi salah satu alasan implementasi *e-government* di Indonesia belum maksimal. Beliau juga menuturkan alasan lain yang menjadi faktor penghambat diantaranya, anggaran kurang memadai, belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan, serta minimnya standarisasi infrastruktur (Lauranti dkk., 2017).

Di sisi lain berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media *website* untuk menginformasikan segala sesuatu melalui internet. Pemanfaatan media sistem informasi *website* untuk menginformasikan profil dan potensi desa juga selaras dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, dimana desa berhak memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi pembangunan.

Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik berbasis *website*. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Hartono dan Mulyanto (2010) dalam Mulyawaty dkk. (2016), *website* desa dapat memberikan informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi di desa yang diperlukan

oleh investor dalam mempertimbangkan pengambilan dan keputusan dalam berinvestasi. Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan pelayanan publik berbasis *website* kepada perangkat Desa Baros, Kabupaten Serang adalah salah satu praktik *e-government*, dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif kepada masyarakat dengan baik, cepat dan prima.

Menyambut implementasi dari Industri 4.0 di Indonesia, melalui praktik *e-government*, berbagai sektor telah mengembangkan beragam inovasi untuk pelayanan publik. Keberhasilan sektor swasta dalam pengembangan dan penerapan inovasi terhadap pelayanannya membuat sektor publik terinspirasi dan mencoba menerapkan teknik yang sama (Eprilianto dkk., 2019). tidak terkecuali dengan Desa Baros yang merupakan bagian dari Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan luas wilayah Desa Baros seluas 5836 jiwa. Desa Baros ini berpeluang untuk berkembang dan maju sebab berada tidak jauh dari pusat Kota Serang dan Pusat Kabupaten Pandeglang lokasi Desa Baros berada di jalan utama yang menghubungkan Kota Serang dengan Kabupaten Pandeglang. Penduduk Desa Baros ini umumnya berpendidikan dan memiliki kehidupan yang cukup layak, namun pandemi Covid 19 telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah pengangguran di Desa Baros karena tidak semua penduduk berusia produktif terserap di lapangan pekerjaan. Berdasarkan laporan yang diterima pengabdian penduduk desa ini berjumlah 5836 jiwa yang terbagi dari 2983 penduduk laki-laki dan 2844 penduduk perempuan, dengan jumlah total 1611 kepala keluarga.

Desa Baros berencana menjadi desa Digital yang merupakan konsep perencanaan berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pengabdian masyarakat dan sistem pemberdayaan masyarakat (Eprilianto dkk., 2019). Penerapan Desa Digital tersebut berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan (Hasya & Wikusna, 2020). Terlebih di tengah situasi pandemi Covid 19 seperti pada tahun 2020 silam, Desa Digital akan menjadi fokus utama pemerintah dalam merevolusi desa (Anurogo dkk., 2020). Telah diketahui bahwa saat ini Desa Baros telah memiliki *website* resmi yang beralamat di <http://baros-baros.desa.id/about-us> sejak tahun 2020, yang berisikan beberapa fitur yang menarik profil desa, struktur organisasi, perangkat desa, lembaga desa, berbagai informasi terkait berita, pengumuman, agenda kegiatan sampai ke APBDesa, fitur potensi dan produk hukum semuanya ada dalam *website* desa Baros. Masalahnya *website* tersebut tidak aktif karena tidak adanya perangkat desa yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengoperasikannya. Sementara itu, *website* ini penting

sebagai sarana dalam pemberian pelayanan publik, sarana komunikasi, pusat informasi dan publikasi berbagai potensi yang ada di desa maupun informasi penting yang harus diketahui oleh warga. Selain itu, *website* juga menjadi menunjang efektivitas dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik, cepat dan prima (Taniarza, 2018). Berkaca dari permasalahan tersebut tim abdimas melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada perangkat Desa Baros dalam pengelolaan *website* sebagai sarana pelayanan publik kepada masyarakat.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan pelayanan publik berbasis *website* kepada Perangkat Desa Baros yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 Perangkat Desa dan 2 lagi perwakilan dari Karang Taruna. Selain memberikan pelatihan selama dua hari tiga malam dengan beberapa tema, tim juga memberikan kesempatan untuk mempraktikkan teori yang telah disampaikan oleh para pelatih dengan didampingi pengabdian.

Sebelum memberikan pelatihan pelayanan publik berbasis *website* menuju Desa Digital, telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan *website* desa sebenarnya sudah direncanakan, bahkan *website* telah dibuat tetapi belum diaktifkan karena berbagai kendala, salah satunya adalah minimnya kapasitas dan SDM yang ada di Perangkat Desa tersebut.

Selain koordinasi dan perencanaan kegiatan, pengabdian ini juga telah dilengkapi dengan *focus group discussion* (FGD). FGD dipilih agar dapat menjangkau peluang dan aspirasi dari pemangku kepentingan Desa Baros dalam upaya mengaktifkan *website* desa. FGD diadakan dengan mengundang perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. (DiskominfoSatik) Kabupaten Serang, perwakilan Kecamatan Baros, perangkat Desa Baros dan elemen masyarakat Desa Baros.

Tahapan yang dilakukan dalam FGD adalah:

1. Paparan dari tim pengabdian tentang arti penting pengembangan desa digital dan pembuatan *website* desa. Paparan dari tim pengabdian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta FGD serta agar diskusi yang dilakukan dapat fokus;
2. Penyampaian pendapat dari peserta yang hadir, yaitu perwakilan DiskominfoSatik Kabupaten Serang, perwakilan Kecamatan Baros, perangkat Desa Baros, dan elemen



masyarakat Desa Baros; dan

3. Tanya jawab.

### 3. Hasil dan Diskusi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengabdian kepada masyarakat setelah melalui beberapa tahap sebelumnya, adalah memberikan pelatihan kepada Perangkat Desa Baros yang berjumlah empat orang, dua diantaranya dari Perangkat Desanya sendiri, dua yang lainnya perwakilan dari Karang Taruna. Pelatihan ini diadakan di Hotel Mercure Jakarta tanggal 21-23 Oktober 2022 dengan lima materi diantaranya materi tentang Pelayanan Publik Berbasis Situs Desa. Jadwal kegiatan pelatihan diberikan dalam Gambar 1.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan RS Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 – Fax.  
7656971 021 – 7656904 Website: [www.fsiip.upnj.ac.id](http://www.fsiip.upnj.ac.id), Email:

**Jadwal Kegiatan**

Waktu	Kegiatan	Narasumber
Jumat, 21 Oktober 2022		
14.00	Peserta Check-In	-
15.30	Pembukaan Kegiatan Pelatihan	Dewanto Samodro, M.I.Kom
16.00-18.00	Materi: Pelayanan Publik Berbasis Situs Desa	Aniqotul Ummah, M.Sos.
Sabtu, 22 Oktober 2022		
08.00-10.00	Materi: Workshop Fotografi dan Videografi Ponsel	Muhammad Nur Akhdiaf
10.00-12.00	Materi: Peran Website dalam komunikasi dan informasi desa	Agus Yasa Wirawan, ST, MM Diskominfosatik Kab. Serang
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.00	Materi: Workshop Penulisan artikel untuk website dan media sosial	Dewanto Samodro, M.I.Kom
15.00-17.00	Materi: Keamanan data digital desa dan warga desa	Jati Satrio M.A.
Minggu, 23 Oktober 2022		
08.00-09.30	Penutupan Kegiatan Pelatihan	Dra. Siti Maryam, M.Si
09.30-10.00	Peserta kembali ke Desa Baros	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan RS Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 – Fax.  
7656971 021 – 7656904 Website: [www.fsiip.upnj.ac.id](http://www.fsiip.upnj.ac.id), Email:

**Jadwal Kegiatan**

Waktu	Kegiatan	Narasumber
Jumat, 21 Oktober 2022		
14.00	Peserta Check-In	-
15.30	Pembukaan Kegiatan Pelatihan	Dewanto Samodro, M.I.Kom
16.00-18.00	Materi: Pelayanan Publik Berbasis Situs Desa	Aniqotul Ummah, M.Sos.
Sabtu, 22 Oktober 2022		
08.00-10.00	Materi: Workshop Fotografi dan Videografi Ponsel	Muhammad Nur Akhdiaf
10.00-12.00	Materi: Peran Website dalam komunikasi dan informasi desa	Agus Yasa Wirawan, ST, MM Diskominfosatik Kab. Serang
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-15.00	Materi: Workshop Penulisan artikel untuk website dan media sosial	Dewanto Samodro, M.I.Kom
15.00-17.00	Materi: Keamanan data digital desa dan warga desa	Jati Satrio M.A.
Minggu, 23 Oktober 2022		
08.00-09.30	Penutupan Kegiatan Pelatihan	Dra. Siti Maryam, M.Si
09.30-10.00	Peserta kembali ke Desa Baros	

Gambar 1. Jadwal kegiatan pelatihan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat

Dalam materi pelayanan publik berbasis situs desa, peserta diberikan pemahaman dari manfaat sistem informasi desa digital (SIDEDI) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa kepada warganya. SIDEDI adalah sebuah aplikasi berbasis *website* dan Platform android yang digunakan untuk mengelola data desa. SIDEDI dirancang sebagai sistem pendukung untuk memberikan pelayanan sekaligus media informasi mengenai administrasi kependudukan perencanaan, pelaporan, layanan publik dan lain sebagainya yang ada di kantor Desa. Gambar 2 memperlihatkan pemberian materi kepada para peserta dan Gambar 3 menunjukkan foto bersama para narasumber dan pemberi materi.

Adapun manfaat yang didapatkan dari adanya sistem informasi desa digital ini adalah:

1. Pelayanan publik, operator desa hanya perlu melihat daftar surat yang diajukan warga melalui aplikasi yang sudah diinstalasi di telepon genggam dengan platform Android.

2. Cukup di telepon genggam dengan platform Android untuk mengurus surat desa, dengan hanya memasukkan NIK dan keterangan pendukung.
3. Media penyambung informasi di desa, dengan informasi digital akan memudahkan warga desa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun, baik informasi bentuk berita, pengumuman, agenda atau hasil dari kinerja pemerintahan desa.
4. Bentuk transparansi Pemerintah Desa seperti menginput dana APB Desa untuk pelaporan, transparansi anggaran, muncul lewat *website* desa dan aplikasi berbasis platform Android sistem informasi digital.
5. .Gunakan e-aduan sebagai kritik dan saran



Gambar 2. Penyampaian materi oleh ketua tim abdimas

Di samping memberikan penjelasan mengenai sistem informasi digital, para peserta juga dibekali mengenai pentingnya *website* desa untuk kemajuan dari desa itu sendiri, yaitu:

a) Pusat informasi lokal

Media elektronik televisi dan radio di zaman seperti saat ini, dirasa masih kurang, perlu adanya *website* desa untuk memuat segala jenis informasi lokal terkait desa.

b) Koordinasi keamanan desa

Banyaknya pemberitaan hoaks *website* desa dapat bermanfaat untuk memberikan informasi penyeimbang yang lebih akurat dan terpercaya.

c) Media silaturahmi perangkat desa dengan warga.

d) Sarana untuk meningkatkan SDM Desa.

*Website* dapat dimanfaatkan untuk menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik warga desa tersebut serta dapat membuat masyarakat desa semangat mempelajari teknologi informasi dan internet dengan cara yang benar.

Selain menjadi penting untuk kemajuan suatu desa, *website* juga memiliki beberapa manfaat yaitu *pertama*, sebagai media promosi dan pengembangan desa. Dengan begitu dapat meningkatkan potensi daya tarik desa terhadap masyarakat dari luar daerah. *Kedua*, media publikasi kegiatan desa. Warga desa dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan yang sedang dan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk kegiatan yang akan, sedang dan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. *Keempat*, alat komunikasi dua arah, menampung aspirasi dan keluhan warga desa setempat dan yang *kelima*, bermanfaat sebagai sumber data yang lengkap.



Gambar 3. Para narasumber dari Diskominfosatik Kab. Serang dan Pemateri fotografi dan videografi ponsel.

#### 4. Kesimpulan

Desa Digital adalah konsep perencanaan berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pengabdian masyarakat dan sistem pemberdayaan masyarakat. Penerapan Desa Digital berkewajiban untuk membangun sistem



informasi desa dan pembangunan kawasan terutama pada situasi yang menuntut adanya revolusi desa seperti wabah covid 19 yang terjadi pada dua tahun silam.

Sebagai pemerintahan di tingkat paling bawah, desa harus memiliki *website*. *Website* desa ini dapat digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintahan desa, diseminasi informasi di tingkat desa, hingga pemasaran produk-produk utama desa yang mungkin dapat dijangkau hingga ke luar desa. Juga sebagai sarana komunikasi, pusat informasi penting yang harus diketahui oleh warga.

Desa Baros, Kecamatan Serang, Banten mencoba ingin menjadi desa digital dengan mengaktifkan *website* desa yang telah ada, dengan cara mengirim perwakilan dari perangkat desa dan kader Karang Taruna untuk mengikuti pelatihan pelayanan publik berbasis *website* yang diselenggarakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat UPN Veteran Jakarta sebagai wujud komitmen dari implementasi *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan lebih efektif, baik, cepat dan prima.

## Daftar Referensi

- Anurogo, D., Suarni, A., Sompia, A.W. & Rahim, A.R. 2020. Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0., *Jurnal Abmas Negeri*, 1(1), 37-41.
- Eprilianto, D. E., Pradana, G. W. & Sari, Y. E. K. 2019. Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), 127-145.
- Hasya, S. & Wikusna, W. 2020. Aplikasi Berbasis Web Desa Digital Bandung Juara pada Modul Pengaduan Warga. *e-Proceeding of Applied Science*, 1, 7.
- Irawan, A. 2018. Sistem Pelayanan Publik Berbasis *e-government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 7(1), 20-37.
- Mardjiono, D. E. 2009. Analisis Pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan TI dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi: studi pada RSUD Kab. Temanggung). Tesis Universitas Padjajaran.
- Mulyawaty, S., Muljono, P., & Seminar, K. B. 2016. Efektivitas *Website* Desa Malasari Dan Peran Internet Opinion Leader. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(2), 120-134.
- Lauranti, M., Djahhari, E.A. & Mawesti, D. 2017. Open Government: Mengkaji Penggunaan *e-government* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Perkumpulan Prakarsa Jakarta*.
- Oktavianoor, R. 2020. Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural. *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, 11(1), 9-19.

- Selwyn, N. 2004. Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341–362.
- Septiani, M. 2020. *E-government* Sebagai Strategi dalam Meminimalisasi Penyebaran Covid-19 dan Efektivitas Pelayanan Publik. Diakses dari laman <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik>
- Sukarno, B. & Saleh, F. 2021. Vertical Conflict, Public Policies, and Pandemic Covid-19: Case Study of Central and Regional Government of DKI Jakarta. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 5(1), 83-104.
- Taniarza, R. 2018. Pengelolaan Informasi melalui *Website* Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Skripsi pada Jurusan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.